

TAJUK RENCANA

Mafia Hukum di MA

SEPERTI yang kita predik-sikan, tersangka kasus suap-pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) bertambah. Kali ini menyasar hakim agung MA, Gazalba Saleh (GS), setelah beberapa waktu lalu diperika Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP). Saat itu, GS bungkam ketika ditanya wartawan terkait materi pemeriksaan. Ia hanya menyerahkan kepada penyidik yang memeriksanya. Jajaran pimpinan MA pun tak banyak bicara menyangkut pemeriksaan GS.

Belakangan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro angkat bicara dan membenarkan bahwa KPK telah menjadikan GS sebagai tersangka kasus suap-pengurusan perkara. MA pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap GS kepada KPK. Sementara KPK, melalui Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri, menyatakan baru akan mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus suap ini setelah penyidikan dianggap cukup (KR 14/11).

Pernyataan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro terkait hakim agung GA yang telah dijadikan tersangka kasus suap-pengurusan perkara di MA, sesungguhnya hanyalah mengonfirmasi dugaan selama ini bahwa kasus suap tersebut tidak hanya melibatkan hakim agung (non aktif) Sudrajad Dimiyati (SD) saja, melainkan juga hakim agung lain.

Apalagi, kalau kita telaah penanganan suatu perkara di MA, terlebih perkara besar, tidaklah mungkin hanya melibatkan hakim tunggal, melainkan majelis hakim. Sejauh ini belum ada informasi detil seputar keterlibatan hakim agung GS dalam perkara yang menyeret koleganya itu. Namun, patut diduga, peran GS sangat signifikan karena berkaitan dengan suatu putusan yang kemudian bisa direkayasa.

Sebab, hakim memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan atas suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Boleh jadi, peran GS tak jauh berbeda dengan SD yang menerima suap dalam pengurusan perkara di MA. Hanya kepastiannya tentu masih menunggu penyidikan KPK. Tapi yang jelas, peran hakim agung dalam pengambilan keputusan terkait suatu perkara di MA sangatlah sentral, bahkan tidak bisa digantikan pihak lain. Jadi, hemat kita, sangat logis bila kemudian KPK tak hanya menetapkan SD sebagai tersangka, melainkan juga hakim agung lainnya.

Penetapan tersangka hakim agung dalam kasus suap-pengurusan perkara di MA, tentu mencoreng wajah institusi peradilan di Indonesia. Apalagi, MA merupakan benteng terakhir para pencari keadilan. Kalau benteng terakhir saja bisa ditembus, bagaimana dengan peradilan yang ada di bawahnya? Pertanyaan awam semacam ini wajar saja bila bergulir di masyarakat, meskipun realitasnya mungkin tidak persis seperti itu. Sebab, kita yakin masih cukup banyak hakim agung yang punya integritas moral dan tak mempan disuap.

Kita masih ingat ketika hakim agung Artidjo Alkostar (alm) masih menempati posisi Ketua Kamar Pidana MA. Boleh dikatakan para koruptor tiarap dan tak berani melakukan suap untuk penanganan suatu perkara. Bahkan, para koruptor yang mengajukan kasasi, hukumannya malah diperberat jika kasusnya ditangani Artidjo. Namun kini setelah Artidjo tiada, seolah para mafia yang semula tiarap berani bergerak dan memainkan perkara demi keuntungan pribadi. Penetapan SD dan GA sebagai tersangka suap penanganan perkara, sesungguhnya mengonfirmasi dugaan tersebut. □-d

KTT G20, dari Indonesia untuk Dunia

PERHATIAN dunia kini sedang tertuju pada KTT G20 tanggal 15 ñ 16 November 2022 di Bali, Indonesia. Banyak harapan akan dihasilkan dari KTT tersebut guna memecahkan berbagai masalah ekonomi dunia, termasuk dampak perang Rusia dan Ukraina. KTT G20 di Bali sekarang ini juga dapat dipandang sebagai tolok ukur keberhasilan presidensi Indonesia di G-20 untuk masa tahun 2021 - 2022.

Kelompok G20 dibentuk 1999 dengan tujuan semula adalah mengatasi krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 - 1998, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Sekarang tujuan G20 juga meliputi usaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Peran Strategis

Anggota G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa sebagai organisasi internasional. Anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kemudian Spanyol diundang sebagai tamu tetap. Jika digabung, maka G20 mewakili lebih dari 80% Produk Domestik Bruto Dunia, 75% perdagangan internasional dan 60% jumlah penduduk dunia. (https://www.g20.org). Karenanya, G20 memiliki peran yang strategis dalam mengarahkan perkembangan dan jalannya kerja sama ekonomi internasional.

Dilihat dari komposisinya, keanggotaan G20 mencakup kelompok negara sedang berkembang dan kelompok negara maju dari seluruh wilayah dunia. Dengan demikian G20 diharapkan bisa menjembatani kepentingan-kepentingan yang sering berlawanan antara negara-negara maju (Kelompok G7) dan negara-negara sedang berkembang (Kelompok G77) dari semua wilayah dunia. Kenyataannya, hingga sekarang perumusan kebijakan ekonomi, keuangan dan moneter internasional masih didominasi negara-negara maju yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dibanding negara-negara

Triyana Yohanes

sedang berkembang. Akibatnya, ketidakadilan ekonomi, kesenjangan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi, ketergantungan ekonomi negara-negara sedang berkembang pada negara-negara maju, masih menjadi masalah perekonomian global. Ini ePRi, pekerjaan rumah G20.

Pilar presidensi G20 Indonesia sekarang ini adalah memperkuat lingkungan kemitraan; mendorong produktivitas; meningkatkan ketahanan dan stabilitas; memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif serta kepemimpinan kolektif glo-



kedaualatan ekonomi, bantuan pembangunan ekonomi untuk negara sedang berkembang, pembangunan berkelanjutan, hak-hak khusus negara sedang berkembang. Kemudian dalam pengambilan kebijakan moneter dan keuangan di *the International Monetary Fund* dan Bank Dunia, negara-negara sedang berkembang juga memperjuangkan perubahan suara dari berdasarkan jumlah simpanan menjadi satu anggota satu suara. Sesuatu yang ditentang negara dengan simpanan banyak.

Gangguan Besar

KTT G20 tahun ini memang mengalami gangguan besar dengan adanya konflik bersenjata Rusia ñ Ukraina. Sehingga seolah keberhasilannya tergantung dari upaya mendamaikan kedua negara yang berperang. Mengingat tujuan G20 adalah kerja sama di bidang keuangan, moneter dan ekonomi internasional, maka keberhasilan presidensi Indonesia dalam G-20 adalah pada upaya menghasilkan kesepakatan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi dunia, bukan pada menghentikan perang Rusia ñ Ukraina.

Semoga dari KTT G-20 di Bali dapat dihasilkan Komunique Bersama yang mengakomodasikan semua *stakeholder* ekonomi dunia. Dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi global, termasuk dampak ekonomi akibat Covid-19 dan perang Rusia - Ukraina. □-d

*) *Dr Triyana Yohanes SH MHum,*
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Bawana dan Buwana

Bandung Mawardi

Kita membuka *Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch* (1906) susunan L Th Mayer. Di halaman 65, terbaca lema *boewana* diartikan *wereld*. Kita mengartikan itu dunia. Dulu, pengertian dunia dan bumi belum tentu sama. *Buwana* masuk dalam bahasa Melayu (Indonesia) berasal dari Bahasa Sanskerta.

Kamus awal abad XX itu agak memandu bagi kita ingin mengerti sejarah penggunaan *buwana* sebagai gelar penguasa di Jawa. Di Jawa, gelar menggunakan diksi *buwana* mengarah ke Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Onghokham dalam buku berjudul *Rakyat dan Negara* (1991) menjelaskan: *iUmpamanya, gelar pangeran mahkota menunjukkan kedudukannya seperti Mangkubumi. Sedangkan gelar ayahnya, sang raja, Hamengkubuwana atau Pakubuwana. Di sini jelas bumi dan buwana menunjukkan derajat kedudukan yang berbeda.*

Di buku berjudul *Katerangan Tegesing Temboeng-Temboeng: Baoesastra Tjilik* (1940), WJS Poerwadarminta menandai *bawana* berasal dari bahasa Kawi. Di halaman 21, *bawana* berarti *panggongan* atau *djagat*. Pembaca mulai mengetahui *bawana* itu *jagat*, bisa diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai 'dunia'. Di halaman 30, Poerwadarminta mengartikan *boewanaitu djagat* atau *tanah kang djembar*. Di kamus kecil, *bawana* dan *buwana* berarti *jagat*.

Memilih

Kita mulai berpikiran dua kata bisa digunakan bila diterjemahkan sebagai 'dunia'. Kongres Kebudayaan Jawa III memilih menggunakan *bawana* bukan *buwana*. Kita ingin memastikan terjema-

BALAI Bahasa DIY, akhir Oktober lalu mengadakan acara peluncuran Kamus Bahasa Jawa-Indonesia edisi digital. Ikhtiar mengajak publik mengandrungi Bahasa Jawa dengan cara melacak kata dan mengetahui pengertian. Mereka tak diharuskan membeli atau memiliki kamus biasa dicetak: tebal dan besar. Kamus digital diharapkan berfaedah bagi orang-orang bergawai.

Peluncuran edisi digital lanjutan dari penerbitan edisi cetak Kamus Bahasa Jawa-Indonesia (2021). Kamus disusun dalam waktu lama, membuktikan keinginan mengajak publik mahir berbahasa Jawa dan mengetahui pengertian dalam bahasa Indonesia. Kamus itu kita buka saat berpikiran Kongres Kebudayaan Jawa III dilaksanakan di Yogyakarta, 14-17 November 2022. Acara akbar bertema muluk dengan menggunakan diksi *bawana*. Tema ingin dipahami bersama: *Kabudayaan Jawa Anjanyang Bawana*.

Menimbulkan Perdebatan

Diksi *bawana* sempat menimbulkan perdebatan. Sebulan lalu, perdebatan di Yogyakarta belum berbekal kamus-kamus. Sekian penjelasan diajukan dengan argumentasi berdasarkan kebahasaan, sejarah, dan ketokohan. Selama perdebatan, kamus-kamus lama dan baru belum disebut. Kita mengira itu wajar saat orang-orang bingung memilih diksi tepat: *buwana* atau *bawana*.

Di Kamus Bahasa Jawa-Indonesia (2021), kita menemukan lema *bawana* di halaman 57. *Bawana* berarti 'bumi' atau 'buana'. *Bawana* termasuk arkais. Kata sudah berusia tua mungkin jarang lagi digunakan. Kita menduga dua pengertian itu belum lengkap bila mengikuti penjelasan untuk Kongres Kebudayaan Jawa III. *Bawana* diartikan 'dunia'. Tafsir sederhana: kebudayaan Jawa ingin 'mendunia'.

Kita mulai tergoda melacak *buwana* dan *bawana* dalam kamus-kamus lama.

han dalam Bahasa Indonesia. Poerwadarminta dalam *Baoesastra Djawi-Indonesia* (1948) justru tak memuat lema *bawana*. Di situ, kita cuma menemukan lema *boewana* di halaman 29. Poerwadarminta mengartikan *boewana* itu *benoea* atau *boeana*. Contoh penggunaan kata: 'benoea Asia'.

Penasaran ingin menemukan jawab. Kita membuka Kamus Praktis Jawa-Indonesia disusun L Mardiwarsito, Sri Sukesi Adiwimarta, dan Sri Timur Suratman. Kamus diterbitkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985. Di halaman 26, *bawana* diartikan 'dunia'. Di halaman 44 *buwana* berarti 'buana'. Penasaran mengenai *bawana* dan *buwana* agak terjawab, setelah kita membuka kamus-kamus. Meski masih menginginkan penjelasan panjang bila digunakan dalam penulisan sejarah atau pengisahan peradaban Jawa. □-d

*) *Bandung Mawardi, Penulis Nostalgia Bahasa Jawa: Pelajaran dan Bacaan' (2022)*

Pojok KR

KPK tetapkan hakim agung Gazalba tersangka suap.

-- Kita sudah menduga sejak awal.

Libur akhir tahun di DIY, belum ada rencana pengetatan.

-- Kasus Covid-19 naik, antisipasi jang-an terlambat.

Banyak warga mengadu namanya dicatut parpol.

-- Fenomena umum, butuh ketegasan KPU.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Sistem Tiket Parkir Stasiun Tugu

BEBERAPA hari yang lalu, saya akan menjemput saudara di stasiun Tugu Yogyakarta. Hari Jumat, tempat parkir stasiun Tugu Yogya sangat padat. Setelah ambil kartu parkir otomatis, saya masuk, tetapi ternyata semua tempat sudah sangat padat. Tak ada celah lagi untuk memarkir mobil. Sehingga saya terpaksa balik, tak jadi parkir hanya mengitari area parkir. Tetapi, ketika keluar saya tetap ditarik Rp 5.000, meski saya hanya lewat. Alasannya, tidak menggunakan tarif berdasarkan waktu. Jadi meski tidak dapat parkir ya tetap harus bayar.

Tentu bukan soal jumlah nominalnya. Namun menurut saya

sistem tersebut perlu diubah. Sistem yang adil, seperti misal di mall atau hotel. Kalau parkir ongkos dihitung lama dan tidaknya parkirnya, bukan pokoknya sudah masuk area. Dan ternyata keluhan semacam itu juga dialami beberapa orang yang kebetulan barengan.

Mungkin pihak KAI perlu menata ulang sistem tiket parkir di Yogya, agar tidak menjadikan keluhan. Apalagi KAI sudah bagus menata sistem pembelian tiket online dan menata situasi stasiun bagus. Sistem parkir ini perlu ditata ulang, apalagi DIY termasuk tujuan favorit wisata menggunakan kereta api. □-d

Ir Sutaryono Minomartani,
Ngaglik, Sleman.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afifah, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)